

## IDENTIFIKASI FAKTOR DETERMINAN RESIDIVISME

Iqrak Sulhin & Yogo Tri Hendiarto<sup>1</sup>

*iqrak.sulhin@ui.ac.id, yogo.hendiarto@ui.ac.id*

### Abstract

*Recidivism are repetition of criminal conduct by individuals on his/her life time. The Instrumen Penelitian Masyarakat or Litmas which been used by correctional system can only provide qualitative information regarding any offender to be use by judge in order to give sentence. Therefore, the need for quantitative determinant analysis to identify inmates re-offending risk factor emerge.*

*The method use by this research gathering is survey method with inmates from Class I A Cipinang Correctional Facility. The process to analyse and identify risk determinant of an inmate for re-offending can give benefit for rehabilitation process given to the inmates. The findings shonw that drugs and/or alcohol abuse, and also emotional or personality problems are factors that correlate to criminal records.*

*Keywords : determinant factor, criminogenic needs, recidivism.*

### Pendahuluan

Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah reaksi formal yang diberikan terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum, yaitu pelaku kejahatan diproses secara hukum dan berujung pada putusan pengadilan. Salah satu bentuk putusan pengadilan adalah dijatuhkannya pidana penjara. Sebagai bagian akhir dari SPP, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjalankan fungsi pembinaan terhadap terpidana berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Umumnya peran Lapas sebagai pelaksana pidana adalah bagian terlama dari keseluruhan proses reaksi formal yang dijalani seorang pelanggar hukum. Lapas-lah yang akan melakukan modifikasi motivasi dan perilaku narapidana. Sehingga pelaku tersebut tidak akan melakukan kembali kejahatan setelah selesai menjalani masa pidana.

Tujuan Sistem Pemasyarakatan Indonesia adalah reintegrasi sosial. Dalam pandangan ini, kejahatan atau pelanggaran hukum adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan korban dan masyarakat. Kejahatan tidak hanya dipandang dalam konteks legal formal saja. Sehingga dalam pelaksanaan program-program pembinaan faktor yang harus

---

<sup>1</sup> Pengajar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

dipertimbangkan adalah latar belakang terjadinya kejahatan itu sendiri. Inilah mengapa, identifikasi terhadap motivasi atau latar belakang kejahatan yang dilakukan penting untuk diketahui, antara lain melalui sistem penilaian (*assessment*).

Saat ini, mekanisme penilaian yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan melalui proses penelitian kemasyarakatan (Litmas). Namun demikian, Litmas yang saat ini masih terbatas pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagai bahan pertimbangan bagi perumusan pola pembinaan bagi narapidana, belum dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator yang tepat. Litmas masih bersifat deskriptif terhadap latar belakang kejahatan yang dialami melalui wawancara dengan pelaku dan pihak lain yang terkait (seperti keluarga dan warga sekitar tempat tinggal) dan observasi terhadap kondisi sosial ekonominya.

Mengacu pada McGuire (2002), Witte (1977) dan Zamble (1997) , penelusuran dan pengukuran terhadap indikator-indikator latar belakang kejahatan sangat penting untuk dilakukan. Selain untuk menentukan bentuk dan program pembinaan bagi narapidana, pengukuran terhadap indikator-indikator ini juga dilakukan untuk memperkirakan tendensi seorang narapidana melakukan pengulangan kejahatan (*reoffending* atau *residivisme*). *Level of Service Inventory-Revised* (LSI-R), yang digunakan oleh negara bagian New South Wales, Australia, merupakan salah satu contoh dari instrumen pengukuran tendensi pengulangan kejahatan tersebut. Instrumen ini mengacu pada instrumen serupa yang dikembangkan di Kanada. Indikator-indikator yang dikembangkan dalam instrumen LSI-R tersebut digunakan sebagai faktor-faktor prediktif bagi tendensi residivisme. Dengan sistem skor tertentu, faktor resiko pengulangan kejahatan dibedakan menjadi tiga kategori besar, yaitu tinggi, sedang, rendah. Semakin tinggi skor yang diperoleh seseorang, semakin tinggi tendensi dirinya melakukan pengulangan kejahatan.

Dalam penegakan hukum, penilaian resiko residivisme ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan putusan pengadilan. Kategori resiko yang ditemukan pada diri seorang pelanggar hukum dapat dijadikan pertimbangan apakah ia diputus penjara atau dikembalikan untuk dibina di masyarakat (*community based correction*). Bila kategori resiko rendah, maka putusan yang diberikan adalah mengembalikannya kepada masyarakat. Melalui proses ini, lembaga pemasyarakatan benar-benar digunakan hanya untuk individu yang membahayakan bagi masyarakat karena memiliki resiko yang besar untuk kembali melakukan kejahatan. Melalui proses ini pula, sistem koreksi diselenggarakan dengan lebih efisien dan efektif.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah belum tersedianya mekanisme penilaian terhadap faktor resiko resedivisme tersebut. Litmas yang dilakukan belum mampu menjadi instrumen prediktif. Litmas hanya memberikan informasi tentang diri dan latar belakang pelanggar hukum yang pada dasarnya dipergunakan sebagai pertimbangan bagi pengadilan untuk memutus perkara. Saat ini Litmas hanya sebagai rekomendasi bagi pengadilan dan terbatas pada kasus anak (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Terhadap kasus orang dewasa, Litmas tidak pernah dilakukan, meski secara teori juga ditujukan untuk kasus-kasus orang dewasa.

Salah satu alasan tidak dilakukannya Litmas untuk rekomendasi pengadilan bagi kasus kejahatan orang dewasa adalah belum dipercayainya validitas informasi yang diberikan. Terdapat kesan kuat bahwa hakim tidak mempercayai Litmas karena dinilai memiliki kelemahan secara metodologis. Selain itu, keterbatasan kemampuan, baik kuantitas maupun kualitas, dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK Bapas) turut menunjukkan kelemahan Litmas tersebut. Fungsi penting Litmas lainnya adalah untuk menemukan bentuk pembinaan yang tepat bagi narapidana.

Dengan dua fungsi penting ini, Litmas seharusnya dikembangkan dengan metode dan indikator-indikator yang tidak hanya bersifat deskriptif namun juga analitis dan prediktif. Kelemahan-kelemahan Litmas tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa Litmas yang diharapkan handal secara metodologis, terutama pada kemampuannya memberikan informasi yang valid agar pihak-pihak yang membutuhkan hasilnya dapat dengan yakin menggunakan rekomendasi Litmas dalam mengambil keputusan.

Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya penelitian ini dilakukan. Tujuan utamanya adalah menemukan apa saja variabel analisis determinan yang dapat menyebabkan seseorang menjadi residivis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan bentuk kebijakan pembinaan yang tepat bagi seseorang berdasarkan faktor determinan residivisme tersebut.

### **Kerangka Pemikiran**

Instrumen prediktif, seperti LSI-R di New South Wales, umum disebut sebagai *risk assessment tools* (penilaian resiko). Faktor resiko yang dimaksud dalam instrumen ini tidak terkait dengan tingkat bahaya dari seseorang yang dianggap berbanding lurus dengan seriusitas kejahatan yang telah dilakukannya. Hal utama yang diperhatikan oleh penilaian resiko adalah indikator-indikator seseorang berpotensi melakukan *re-offending* atau residivisme, yaitu faktor-faktor yang juga terkait dengan alasan kejahatan dilakukan.

Penilaian resiko juga berupaya menemukan indikator apakah seseorang terbuka untuk pembinaan/rehabilitasi, pendidikan, dan pekerjaan yang akan diberikan selama menjalani pemenjaraan.

Beberapa indikator resiko yang dimaksud adalah keterlibatan pelanggar hukum atau terpidana sebagai pengguna narkoba, status ekonomi sebagai pengangguran, atau pernah memiliki catatan pelanggaran hukum saat masih remaja. Bila seseorang memenuhi indikator-indikator tersebut, maka ia dikategorikan sebagai pelanggar hukum atau terpidana yang beresiko.

Penilaian resiko yang dilakukan pada tahap *pre-sentence* (sebelum putusan pengadilan) dapat dipergunakan oleh penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang perlu dipenjarakan (*custody*) atau dikembalikan ke masyarakat dengan alternatif pidana tertentu (*non custody*). Penilaian resiko yang dilakukan setelah putusan pengadilan (*post sentence*) akan menentukan bentuk pembinaan yang diberikan kepada terpidana. Penilaian resiko dalam hal ini diperlukan untuk menyusun *case management plan*, seperti bagi pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang akan diberikan program khusus psikologi untuk meningkatkan kemampuan menghargai orang lain. Penilaian resiko dinilai sebagai landasan intervensi yang efektif bagi sistem koreksi karena menunjukkan bahwa pelanggar harus diperlakukan dengan tingkat pengawasan dan pola pembinaan yang sesuai dengan tingkat risikonya.

Tahun 1990, Andrews, Bonta, dan Hoge mengungkapkan pentingnya prinsip resiko dalam penilaian terhadap para pelanggar hukum. Mereka menegaskan bahwa perlakuan berupa pengawasan maksimal (*maximum security*) lebih tepat diperuntukkan bagi narapidana yang memiliki resiko yang tinggi (*high risk offender*). Sementara bagi *low risk offender*, pengawasan dan perawatan yang diberikan seharusnya berada pada tingkat yang minimum. Langkah awal untuk menyusun perangkat penilaian resiko ini adalah melakukan identifikasi terhadap faktor apa saja yang menjadi ukuran bahwa seorang pelanggar beresiko dalam kategori tertentu.

Andrews dan Bonta (1998) menjelaskan beberapa faktor resiko yang berpengaruh adalah sikap anti sosial, rekan (asosiasi), dan riwayat perilaku anti sosial. Sementara menurut Gendreau, Little dan Goggin (1996), faktor resiko juga mencakup kepribadian, karakteristik keluarga, pendidikan dan pekerjaan.

Prinsip yang mendasari asesmen resiko ini adalah *risk, needs, and responsivity* (Tony Ward dan Shadd Maruna, 2007:44). Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa pelayanan oleh pamarasyarakatan harus mengintervensi faktor-faktor yang memungkinkan dilakukannya kembali kejahatan oleh pelanggar (*risk principle*), kebutuhan-kebutuhan kriminogenik pelanggar (terkait dengan latar belakang dilakukannya pelanggaran), dan

menyesuaikan mekanisme intervensi dengan karakteristik atau kemampuan si pelanggar hukum. Prinsip intervensi ini muncul karena pengalaman pelayanan sistem koreksi cenderung berjalan tidak efektif dan inefisien, atau *nothing works*. Instrumen asesmen resiko ini berupaya menemukan subjek dan aspek yang benar-benar perlu diintervensi. Dalam analisis penelitian ini, faktor resiko yang diidentifikasi adalah riwayat kejahatan, pendidikan dan pekerjaan, keuangan, keluarga, narkoba dan alkohol, serta emosi dan kepribadian.

Tabel 1 berikut adalah deskripsi umum dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Operasionalisasi dari masing-masing faktor tersebut tentunya tidak terbatas hanya pada pertanyaan sebagaimana diperlihatkan oleh tabel.

**Tabel 1**  
**Deskripsi Umum Pertanyaan Dalam Instrumen**

No	Faktor Resiko	Pertanyaan
1	Riwayat Kejahatan	Pernah/tidak melakukan pelanggaran hukum
		Pernah/tidak ditahan ketika berusia kurang dari 18 tahun
		Pernah/tidak dipenjara sebelumnya
2	Pendidikan dan pekerjaan	Pernah/tidak bekerja sebelum ditahan/dipenjara
		Pernah/tidak dipecat selama bekerja
		Penghasilan yang diterima cukup/tidak untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga
3	Keuangan	Memiliki/tidak masalah keuangan untuk menghidupi diri/keluarga
		Cukup/tidaknya penghasilan untuk membiayai kebutuhan dasar
4	Keluarga	Memiliki/tidak memiliki hutang dengan bank/orang lain
		Bahagia/tidak dengan keluarga
		Mencintai/tidak pasangan hidup
5	Narkoba dan alkohol	Pernah/tidak menyakiti anggota keluarga
		Kecanduan/tidak narkoba dan alkohol
		Mengenal narkoba dari teman/lingkungan
6	Emosi dan kepribadian	Penilaian individu apakah narkoba/alkohol penyebab dilakukannya kejahatan
		Apakah individu tipe pemarah/tidak
		Mudah/tidak menahan emosi
		Mudah/tidak mudah panik

**Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif melakukan proses pengukuran dalam menganalisis gejala sosial yang diteliti (Prasetyo & Jannah, 2006). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk

menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang akan diteliti (Bungin, 2005). Untuk pengumpulan data maka dilakukan metode survei dan studi literatur. Adapun instrumen (kuesioner) yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan modifikasi terhadap instrumen LSI-R yang digunakan dalam penilaian resiko di NSW Australia.

Populasi penelitian yang akan dijadikan subyek penelitian adalah narapidana yang berada di Lapas Cipinang Klas I A Jakarta Timur, yang diputus bersalah oleh pengadilan karena melakukan *property related crimes* (kejahatan terkait properti). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terkait properti ini diatur dalam pasal 362 (pencurian), 363 (pencurian dengan pemberatan), dan 365 (pencurian dengan kekerasan). Oleh karenanya, responden penelitian ini adalah narapidana yang dipidana karena pelanggaran terhadap ketiga pasal tersebut, dan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki.

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah non-probabilita dengan ragam *accidental*, dengan total jumlah responden adalah 100 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji statistik Deskriptif yang akan dibantu dengan mesin pengolah data SPSS versi 18. Uji statistik deskriptif yang akan digunakan antara lain dengan tabel frekuensi, tabel deskriptif, tabulasi silang, korelasi, dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik.

Dengan menggunakan teknik analisis variabel *dummy*, data dengan skala nominal yang diperoleh dapat dilihat hubungannya dengan analisa korelasi. Analisis hubungan ini dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja dalam penelitian ini yang patut dipertimbangkan sebagai indikator prediktif dalam residivisme. Perlu dijelaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan indikator prediktif dalam hal ini adalah faktor-faktor yang terkait secara langsung dengan latar belakang terjadinya kejahatan/pelanggaran, atau yang disebut dengan *criminogenic needs*.

Asumsinya adalah, bila diketahui faktor tertentu adalah faktor yang dominan sebagai latar belakang dilakukannya kejahatan atau pelanggaran, maka bila faktor tersebut tidak dirubah/diintervensi dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, maka faktor tersebut dapat dianggap sebagai faktor resiko residivisme. Dalam uji korelasi ini, batas toleransi kesalahan (marjin error) atau nilai level signifikan adalah 0.05. Sehingga dua variabel berhubungan bila nilai signifikan di bawah 0.05.

### **Karakteristik Responden**

Dari 100 reponden yang dipilih, 9% adalah pelaku pencurian dan 65% pelaku pencurian dengan pemberatan. Sementara 26% yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan. 79% responden berasal dari Jakarta,

Bogor, Tangerang, dan Bekasi, sedangkan sisanya berasal dari kabupaten/kota lain di Jawa dan Sumatera. 54% responden berstatus menikah, 39% belum menikah, dan 7% berstatus cerai. Pendidikan terakhir responden adalah 33% Sekolah Dasar, 31% Sekolah Menengah Pertama, 32% Sekolah Menengah Atas, 1% Perguruan Tinggi, dan 3% tidak bersekolah. Dari sisi penghasilan per bulan, 43% responden berpenghasilan < Rp.500.000, 29% berpenghasilan Rp.500.001-Rp.1.000.000, 17% berpenghasilan Rp.1.000.001-Rp.2.000.000, dan 11% berpenghasilan di atas Rp.2.000.000. Terdapat 22% responden yang penghasilannya dikonsumsi oleh 2 orang, 25% penghasilan dikonsumsi oleh 3 orang, 14% dikonsumsi oleh 4 orang, 13% dikonsumsi oleh 5 orang, dan 8% dikonsumsi oleh 6 orang, serta ada 2% yang dikonsumsi 10 orang.

**Temuan dan Diskusi**

Dari 6 faktor yang diuji dalam penelitian ini, yaitu riwayat kejahatan, pendidikan dan pekerjaan, keuangan, keluarga, narkoba dan alkohol, serta emosi dan kepribadian, tidak semua memiliki hubungan yang signifikan. Asumsi bahwa pendidikan dan pekerjaan berhubungan bahkan mempengaruhi munculnya kejahatan (riwayat kejahatan) terbukti tidak berhubungan dalam analisis ini, nilai sig (2-tailed) 0.802. Demikian pula hubungan antara faktor keuangan dengan riwayat kejahatan, tidak berhubungan secara signifikan, nilai sig (2-tailed) 0.758.

Tabel 2 dan tabel 3 berikut adalah tabel silang yang memperlihatkan hubungan antara riwayat kejahatan dengan pendidikan dan pekerjaan, serta antara riwayat kejahatan dengan keuangan.

**Tabel 2**  
**Tabel Silang Antara Riwayat Kejahatan dengan Pendidikan dan Pekerjaan**

		Pendidikan & Pekerjaan		Total
		Rendah	Tinggi	
Riwayat Kejahatan	Rendah	15.0%	66.0%	81.0%
	Tinggi	4.0%	15.0%	19.0%
Total		19.0%	81.0%	100.0%

Sumber: Output SPSS

Tabel 2 memperlihatkan pada kelompok riwayat kejahatan yang rendah, 18.5%-nya memiliki masalah dengan pendidikan dan pekerjaannya, dan pada kelompok riwayat kejahatan tinggi, 26.3%-nya juga memiliki masalah dengan pendidikan dan pekerjaannya. Ini berarti tidak ada perbedaan proporsi pendidikan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut.

**Tabel 3**  
**Tabel Silang Antara Riwayat Kejahatan dengan Keuangan**

		Keuangan		Total
		Rendah	Tinggi	
Riwayat Kejahatan	Rendah	78.0%	3.0%	81.0%
	Tinggi	18.0%	1.0%	19.0%
Total		96.0%	4.0%	100.0%

Sumber: Output SPSS

Pada tabel 3, hubungan antara riwayat kejahatan dengan keuangan terjadi sebagai berikut. Pada kelompok riwayat kejahatan rendah, terdapat 96.3% yang memiliki masalah dengan keuangannya. Pada kelompok kejahatan tinggi, 94.7% juga memiliki masalah dengan keuangannya. Hal ini menunjukkan tidak ada perbedaan proporsi masalah keuangan yang signifikan pada kedua kelompok tersebut. Sekaligus pula menunjukkan temuan kebalikan dengan asumsi bahwa masalah keuangan merupakan salah satu motivasi dilakukannya kejahatan.

Analisis hubungan dua tabel di atas memperlihatkan, bahwa dalam sampel yang diteliti, masalah dalam pendidikan dan pekerjaan, serta masalah keuangan, belum dapat dianggap sebagai faktor-faktor prediktif bagi residivisme karena hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan terjadinya kejahatan justru tidak signifikan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa masalah penggunaan narkoba dan alkohol serta masalah emosi dan kepribadian memiliki hubungan yang signifikan dengan peristiwa kejahatan, yang dilihat dari riwayat pelanggaran responden.

Riwayat kejahatan berhubungan dengan variabel masalah penggunaan narkoba dan alkohol, dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0.000. Sementara riwayat kejahatan berhubungan dengan variabel masalah emosi dan kepribadian dengan nilai sig (2-tailed) sebesar 0.000. Hubungan ini dapat dilihat pada tabel 4 dan tabel 5.

Tabel 4 memperlihatkan pada kelompok riwayat kejahatan yang tinggi, terdapat 31.6% yang memiliki masalah dengan penggunaan narkoba dan alkohol. Pada kelompok riwayat kejahatan yang rendah, terdapat 79% yang memiliki masalah dengan penggunaan narkoba dan alkohol. Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan proporsi masalah penggunaan narkoba dan alkohol yang signifikan pada kedua kelompok tersebut.

Pada tabel 5, terlihat bahwa pada kelompok dengan riwayat kejahatan yang tinggi, terdapat, 21% yang memiliki masalah dengan emosi dan kepribadian. Sedangkan pada kelompok dengan riwayat kejahatan yang rendah terdapat 75.3% yang memiliki masalah dengan emosi dan



kepribadian. Terlihat perbedaan proporsi masalah emosi dan kepribadian yang signifikan pada kedua kelompok tersebut.

**Tabel 4**  
**Tabel Silang Antara Riwayat Kejahatan dengan Narkoba dan Alkohol**

		Keuangan		Total
		Rendah	Tinggi	
Riwayat Kejahatan	Rendah	64.0%	17.0%	81.0%
	Tinggi	6.0%	13.0%	19.0%
Total		70.0%	30.0%	100.0%

Sumber: Output SPSS

**Tabel 5**  
**Tabel Silang Antara Riwayat Kejahatan dengan Emosi dan  
Kepribadian**

		Keuangan		Total
		Rendah	Tinggi	
Riwayat Kejahatan	Rendah	61.0%	20.0%	81.0%
	Tinggi	4.0%	15.0%	19.0%
Total		65.0%	35.0%	100.0%

Sumber: Output SPSS

Selain adanya hubungan yang signifikan antara riwayat kejahatan dengan faktor narkoba dan alkohol, serta antara riwayat kejahatan dengan emosi dan kepribadian, juga terdapat hubungan lain yang signifikan antar faktor, sebagai berikut. Pertama, hubungan yang signifikan antara faktor keuangan dengan faktor narkoba dan alkohol (nilai signifikansi 0.046). Kedua, faktor keuangan dengan emosi dan kepribadian (nilai signifikansi 0.005). Ketiga, faktor narkoba dan alkohol dengan emosi dan kepribadian (nilai signifikansi 0.000). Keempat, antara faktor kepribadian dan emosi dengan faktor keuangan (nilai signifikansi 0.005).

Meski analisis ini tidak memperlihatkan arah hubungan, hubungan-hubungan ini memperlihatkan bahwa masalah keuangan, penyalahgunaan narkoba dan alkohol, serta emosi dan kepribadian berhubungan satu dengan lain dan dapat dijadikan indikasi bahwa kejahatan serta pengulangan kejahatan dapat dilatari oleh faktor-faktor tersebut.

Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa dalam konteks responden yang diteliti faktor penggunaan narkoba dan alkohol serta emosi dan kepribadian yang dapat dianggap sebagai determinan residivisme. Dalam prinsip resiko, kebutuhan, dan responsifitas, dengan ditemukannya faktor-faktor yang berhubungan signifikan dengan riwayat kejahatan ini, maka program-program pembinaan yang diberikan kepada narapidana selama ia

berada di dalam Lapas harus secara khusus ditujukan untuk mengintervensi faktor tersebut.

Pola pembinaan narapidana di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan. Di bawahnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada tahun 1990 melalui Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 juga ditetapkan Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Secara substantif, pola pembinaan yang dilakukan belum membedakan secara jelas kebutuhan dari masing-masing narapidana. Sehingga pola pembinaan masih sangat bias laki-laki dewasa atau belum membedakan pola untuk subjek-subjek lain seperti anak, perempuan, kelompok rentan. Termasuk belum jelasnya pola pembinaan untuk *dangerous prisoners*, seperti narapidana terorisme, pelaku kekerasan seksual, pelaku pembunuhan berantai, pelaku korupsi, atau pengedar dan produsen narkoba.

Hal yang menjadi perhatian penting adalah bahwa pola pembinaan yang diterapkan belum berdasar pada kondisi objektif narapidana yang diperoleh melalui mekanisme penilaian tertentu. Oleh karenanya, tujuan dan bentuk pembinaan menjadi sangat normatif dan sulit ditentukan indikator keberhasilannya.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sesuai peraturan formal tersebut, dibedakan menjadi dua program, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Dalam pembinaan kepribadian, Pemasyarakatan mengintervensi sisi psikologis, pandangan diri, dan spiritualitas dari narapidana, dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan konseling. Sementara pembinaan kemandirian, ditujukan untuk mempersiapkan kapasitas narapidana dalam ekonomi saat bebas dari pidana penjara, melalui pelatihan maupun kegiatan kerja selama berada di dalam Lapas.

Pola pembinaan seperti ini diberlakukan secara umum terhadap seluruh narapidana dewasa, sehingga sangat mungkin program pembinaan yang diberikan justru tidak diperlukan oleh narapidana. Hal inilah yang menjadi alasan utama perlunya sebuah program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari narapidana. Asumsi-asumsi teoritik memperlihatkan efektivitas pembinaan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana program-program dirancang dengan memperhatikan kebutuhan narapidana.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pembinaan yang efektif adalah pembinaan yang fokus pada persoalan penggunaan narkoba dan alkohol serta emosi dan kepribadian dari narapidana. Bila dilihat dalam konsepsi pembinaan di Lapas, maka pembinaan yang diprioritaskan adalah pembinaan kepribadian, bukan pembinaan kemandirian.

## Kesimpulan

Pengembangan pola pembinaan kedepan perlu disusun berdasarkan sistem penilaian yang objektif terhadap *risk factors* dan *criminogenic needs* dari subjek. Seperti yang ditemukan oleh penelitian ini, bahwa narapidana lebih memerlukan pembinaan kepribadian daripada kemandirian karena faktor yang berhubungan signifikan dengan riwayat kejahatan adalah penyalahgunaan narkoba/alkohol dan permasalahan emosi/kepribadian.

Kebutuhan kriminogenik adalah latar belakang dilakukannya pelanggaran hukum. Untuk mengetahui faktor-faktor determinan ini, diperlukan sebuah instrumen dan institusi yang secara khusus berperan. Penelitian kemasyarakatan yang saat ini dipergunakan dalam sistem pemasyarakatan pada dasarnya merupakan langkah awal dalam penilaian, namun metode dan indikator yang dipergunakan belum mampu menjadikan Litmas sebagai instrumen prediktif munculnya residivisme.

Menemukan faktor determinan residivisme, sebagaimana dilakukan oleh penelitian ini, adalah langkah awal dalam upaya pengembangan instrumen penilaian resiko dan kebutuhan narapidana untuk tujuan penentuan program-program pembinaan. Sistem Pemasyarakatan Indonesia, sebagai institusi yang berfungsi dalam membina narapidana perlu memulai upaya ini dengan melakukan penelitian-penelitian yang lebih luas untuk menemukan indikator-indikator yang lebih lengkap. Ini merupakan upaya mewujudkan *Responsivity principle* yang membantu untuk memutuskan siapa yang akan diuntungkan dari program rehabilitasi yang intensif. Penelitian tersebut diperlukan untuk menentukan apakah pelanggar yang memiliki karakteristik tertentu akan memberikan respon yang berbeda terhadap program pembinaan yang diberikan.

## Daftar Pustaka

- Alpert, Geoffrey P., John M. Finney, James F. Short. (1978). **Legal Services, Prisoners' Attitudes and "Rehabilitation"**. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 69, No. 4, pp. 616-626. Northwestern University.
- Blanche, Martin Terre, Ed. (1999). **Research in Practice : Applied Methods for The Social Sciences**. Cape Town : University of Cape Town Press.
- Bleich, Jeff. (1989). **The Politics of Prison Crowding**. *California Law Review*, Vol. 77, No. 5, pp. 1125-1180. California Law Review, Inc.

- Blumstein, Alfred. (1988). **Prison Populations: A System out of Control?** *Crime and Justice*, Vol. 10, pp. 231-266. The University of Chicago Press.
- Deflem, Mathieu, Ed.. (2006). *Sociological Theory and Criminological Research : Views From Europe and The United States*. Elsevier, Ltd.
- Ellis, Lee, et.al. (2009). *Handbook of Crime Correlate*. Academic Press.
- Forum on Corrections Research. (2009). **Measuring Residivism.** *Correctional Service of Canada*, Vol. 1. No. 2.
- Gaes , Gerald G. (1985). *The Effects of Overcrowding in Prison. Crime and Justice*, Vol. 6, pp. 95-146. The University of Chicago Press.
- Hanson, R. Karl. (2000) **Will They Do It Again? Predicting Sex-Offense Recidivism.** *Current Directions in Psychological Science*, Vol. 9, No. 3, pp. 106-109. Blackwell Publishing on behalf of Association for Psychological Science.
- Hartman, A. A. (1940) **Recidivism and Intelligence.** *Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951)*, Vol. 31, No. 4, pp. 417-426. Northwestern University.
- Kemshall, Hazel. (2008). *Understanding the Community Management of High Risk Offenders*. Berkshire: Open University Press.
- Lowenkamp, Christopher T. (2004). *Understanding the Risk Principle : How and Why Correctional Interventions Can Harm Low-Risk Offenders. Topics in Community Corrections*. University of Cincinnati.
- McGuire, James. (2002). **Offender Rehabilitation and Treatment: Effective Programs and Policies to reduce Reoffending.** Sussex: John Wiley and Sons.
- Reid, Lesley William. (2003). *Crime in The City : A Political and Economic Analysis of Urban Crime*. USA : Library of Congress Cataloging-in Publication Data.
- Ward, Tony dan Shadd Maruna. (2007). *Rehabilitation*. London and New York: Routledge.
- Witte, Ann D. and Peter Schmidt. (1977). **An Analysis of Recidivism, Using the Truncated Lognormal Distribution.** *Journal of the Royal Statistical Society. Series C (Applied Statistics)*, Vol. 26, No. 3, pp. 302-311. Royal Statistical Society Stable.
- Zamble, Edward dan Vernon Quinsey. (1997). *Criminal Recidivism Process*. Cambridge University Press.